

**PELAKSANAAN PROGRAM SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA DI DESA
TANJUNG AIR HITAM KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN 2021**

Oleh : Ari Adia Putra
Pembimbing: Adlin, S. Sos., M. Si.
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The labor-intensive rural sanitation program has provided access or opportunities for workers, especially craftsmen in the villages, in the sense that this program aims to provide employment opportunities for craftsmen who currently or do not have work so that with the existence of government programs that require craftsmen they can provide income. as well as improving the economic level of village communities. In this way, it can help the economy of the poor. This research aims to analyze the community's response regarding the implementation of a labor-intensive rural sanitation program in Tanjung Air Hitam Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency in 2021. The method in this research uses a descriptive quantitative approach. Data sources consist of primary data and secondary data collected through questionnaires, interviews and documentation.

The results of this research indicate that the implementation of the sanitation program in Tanjung Air Hitam Village was carried out by craftsmen from outside the village, giving rise to opposition within the village community. This has been proven based on research results using questionnaires as a measuring tool for responses from respondents/the public. And not all poor people receive the Tanjung Air Hitam Village Sanitation Program. This is proven by the number of sanitation facilities intended for poor people, which amounted to 79 people, but only 52 people were able to accept it, while the remaining 27 people or other poor people who were promised a number of jobs from this program were in fact not involved as artisan workers. This has caused disappointment for the people of Tanjung Air Hitam Village.

Keywords: Policy, Implementation, Sanitation Program

I. Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar sebagai petani. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Lingkup pembangunan desa antara lain pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana termasuk sanitasi¹. Pembangunan bidang sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama dari semua tingkatan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi², sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator terkait dengan tugas-tugasnya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi lingkungan. Dana Alokasi Khusus Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi, yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK bidang sanitasi ini khususnya diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi masyarakat yang belum mencapai standar tertentu.

Permasalahan sanitasi di perdesaan sekarang ini menjadi sangat penting, Tidak memadainya sarana dan sanitasi akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan yang tidak higienis. Salah satu faktor yang mencirikan permukiman kumuh adalah permasalahan sanitasi yang sekarang ini menjadi sangat penting.

Pelaksana atau yang terlibat dalam pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat karya di Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 dimulai tingkat nasional. Pada tingkat nasional yang menjadi pelaksanaanya adalah Kementerian

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya diturunkan kepada tingkat daerah yang menjadi pelaksana adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan. Untuk melaksanakan program sanitasi perdesaan padat karya ini dan menetapkan desa sasaran pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat karya serta mengkoordinasikan penyelenggaraan program tersebut dan pelaksana di tingkat desa dalam kegiatan program sanitasi perdesaan padat karya yaitu mensosialisasikan program kepada masyarakat dan penetapan daftar nama kartu keluarga penerima manfaat.

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap³. Kebijakan padat karya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja karena ketidakmampuannya untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan, menganggur atau tidak memiliki penghasilan tetap. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan padat karya yaitu menyediakan kesempatan kerja sementara bagi penganggur dan setengah menganggur, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah dan meningkatkan pendapatan bagi penganggur dan setengah menganggur⁴.

³ Indonesiabaik.id Program Padat Karya, Serap Tenaga Kerja.

⁴ Cimahikota.go.id. Upaya Tingkatkan Kesejahteraan, Padat Karya Beri Kesempatan Masyarakat Terlibat Kegiatan Pembangunan Pemkot Cimahi.

Program sanitasi perdesaan padat karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan,

meningkatkan pendapatan masyarakat. Program sanitasi perdesaan padat karya ini dilaksanakan secara mandiri oleh desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di desa dan juga pelaksanaan program ini berdasarkan asas “Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintahan desa, penyelenggaraan program sanitasi perdesaan padat karya memiliki maksud:

1. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya.
2. Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa
4. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat
5. Menekan jumlah pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin
6. Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa
7. Meningkatkan akses sanitasi.

Tujuan yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan program sanitasi perdesaan padat karya adalah:

1. Meningkatkan perluasan akses sanitasi dengan menyediakan prasarana dan sarana sanitasi yang berkualitas,

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan.

2. Meningkatkan pemahaman tentang sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat.
3. Menciptakan lapangan kerja sementara yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi warga setempat⁵.

Desa Tanjung Air Hitam terpilih menjadi desa pelaksana program sanitasi perdesaan padat karya karena desa yang mayoritas penduduknya masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin. Berdasarkan data, bahwa jumlah masyarakat miskin di Desa Tanjung Air Hitam sebanyak 79 orang. Dari data tersebut sebagian mereka adalah masyarakat yang kurang memiliki akses dalam hal lapangan pekerjaan. Mayoritas masyarakat Desa Tanjung Air Hitam bekerja sebagai petani. Namun tidak semuanya bertani serta memiliki kebun. Selain petani terdapat juga masyarakat yang bekerja sebagai tukang. Lapangan pekerjaan untuk para tukang berbeda dengan para petani serta profesi pekerjaan lainnya. Dimana para petukang bekerja jika dibutuhkan. Jika tidak ada pekerjaan, maka para tukang tidak bekerja dan tidak dapat mendapatkan penghasilan untuk perekonomian keluarga. Jika terus demikian maka kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Air Hitam dapat semakin menurun.

Program sanitasi perdesaan padat karya, telah memberikan akses atau peluang bagi para pekerja khususnya para

tukang yang ada di desa dalam artian program ini bermaksud memberikan lapangan pekerjaan untuk para tukang yang sedang atau tidak mempunyai pekerjaan. Sehingga dengan adanya program pemerintah yang membutuhkan para tukang dapat memberikan penghasilan serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian dapat membantu perekonomian masyarakat miskin.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat karya di Desa Tanjung Air Hitam, penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Tanjung Air Hitam karena terpilih menjadi salah satu desa penerima program sanitasi perdesaan padat karya tahun 2021, Dari program sanitasi perdesaan padat karya Desa Tanjung Air Hitam mendapat anggaran sebesar Rp: 500.000.000 yang bersumber dari APBN, pembangunan sarana sanitasi dengan rincian penggunaan yaitu 60% dari total dana untuk bahan/material, 35% dari total dana untuk upah pekerja dan 5% untuk kegiatan non fisik. Desa Tanjung Air Hitam mendapatkan total 52 unit toilet individu bagi masyarakat yang tidak mempunyai toilet.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya, maksud dari program sanitasi perdesaan padat karya ini adalah penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya dan tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja sementara yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi warga setempat. Akan tetapi, pada realitanya pelaksanaan program sanitasi perdesaan

⁵ Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 04/SE/DC/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya Lampiran C.Sanitasi Perdesaan Padat Karya

padat karya di Desa Tanjung Air hitam tersebut dilaksanakan atau dikerjakan oleh masyarakat yang berasal dari luar daerah. Sebanyak 20 orang pekerja dari luar desa yang bekerja sebagai tukang untuk program sanitasi perdesaan padat karya di Desa Tanjung Air Hitam. Sementara di Desa Tanjung Air Hitam itu sendiri juga memiliki sekitar 18 orang tukang yang bisa bekerja untuk program tersebut tetapi semuanya tidak dipekerjakan justru mereka yang dari luar yang bekerja. Fenomena ini, menimbulkan kekecewaan dari masyarakat asli Desa Tanjung Air Hitam karena pelaksanaan program yang seharusnya berdasarkan peraturan itu dilakukan secara swakelola, tetapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Swakelola disini adalah program sanitasi perdesaan padat karya dilaksanakan secara mandiri oleh desa dengan mendayagunakan tenaga kerja dan peralatan serta teknologi yang ada di desa.

Berdasarkan latar belakang penelitian, bahwa fenomena yang terjadi di Desa Tanjung Air Hitam adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program sanitasi padat karya seharusnya dikerjakan oleh masyarakat desa sendiri. Namun, di Desa Tanjung Air Hitam dilakukan oleh tukang dari luar desa, sehingga menimbulkan kontra dalam masyarakat desa.
2. Pelaksanaan program sanitasi padat karya seharusnya melibatkan masyarakat desa khususnya masyarakat pengangguran dan semi pengangguran untuk menekan angka pengangguran di desa. Namun, tidak semua masyarakat miskin terlibat dalam program sanitasi padat karya Desa Tanjung Air Hitam.

Dari uraian di atas penulis tertarik meneliti tentang “Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat karya di Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini yakni sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat karya di Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2021?

1.3 Kerangka Teori

A. Pelaksanaan Kebijakan

Pengertian pelaksanaan kebijakan oleh Charles O. Jones dalam (Tahir, 2015) mengatakan bahwa: pelaksanaan kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa⁶.

⁶ Tahir, A. (2015) *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Pelaksanaan Program

Menurut Sedarmayanti (2014:22) Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi suatu program dapat dilihat dalam proses pembentukan dan atau pelaksanaan program, melihat bagaimana pengelola program bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cepat, tepat seta memuaskan.

1.4 METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan tahapan peneliti menjelaskan cara bagaimana penelitian dapat dilakukan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, peneliti harus menentukan metodologi penelitian yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Untuk memperoleh data dan informasi maka penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitati Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui angket, wawancara dan dokumentasi

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Analisis Deskriptif Respon Masyarakat

Pelaksanaan program ini berdasarkan asas “Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintahan desa, Penyelenggaraan program sanitasi perdesaan padat karya memiliki maksud. Maka sebagai umpan balik dari masyarakat tentunya berhak memberikan respon atas pelaksanaan program sanitasi serta manfaat yang dirasakan. Berikut ini merupakan indikator yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara Swakelola dan padat karya.
2. Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat Desa
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa
4. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat
5. Menekan jumlah pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin
6. Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa
7. Meningkatkan akses sanitasi.

3.2.1 Penciptaan Lapangan Kerja

Adanya program padat karya tunai desa ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di desa khususnya masyarakat Desa Tanjung Air Hitam

melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya. Berikut tanggapan dari responden pada tabel 3.7:

Tabel 3. 7
Penciptaan Lapangan Kerja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	11	21
2	Tidak	41	79
Jumlah		52	100

Sumber: Data Primer Mei 2023

Berdasarkan Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa dari 52 responden yang dijadikan sampel terdapat 41 responden atau 79% menyatakan **Tidak**, dan sisanya sebanyak 11 atau 21% menyatakan **YA**.

Salah satu alasan adanya program ini dapat menciptakan lapangan kerja khususnya masyarakat Desa Tanjung Air Hitam melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya. Penjelasan kenapa mayoritas responden menyatakan "tidak" tersebut diantaranya diungkapkan oleh salah satu responden yaitu RH mengungkapkan:

*"Memang komitmen awalnya para pihak yang bertanggungjawab pada program ini sifatnya swakelola. Namun dalam pelaksanaannya tidak demikian serupa dengan apa yang dikomitmenkan sejak awal"*⁷

Penjelasan kenapa mayoritas responden menyatakan "tidak" tersebut juga diungkapkan oleh salah satu responden yaitu YS mengungkapkan:

*"Saya rasa tidak sama sekali, saya sebagai masyarakat desa ini tidak ada dibawa kerja sama mereka"*⁸

Berdasarkan ungkapan dari salah satu responden yaitu RH dan YS, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden (79%) menyatakan program ini tidak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Air Hitam. Hal ini dapat dibuktikan melalui jumlah tukang ataupun pekerja dari pembuatan toilet individu bantuan dalam program sanitasi perdesaan padat karya di Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 di dominasi oleh pekerja atau tukang yang berasal dari desa lain. Hal ini pula yang menjadi sumber kekecewaan bagi masyarakat Desa Tanjung Air Hitam, karena masyarakat tidak dilibatkan secara utuh dalam program ini melalui perkerja atau tukang setempat. Fenomena ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Irfan Sofi (2020), artikel ini menemukan bahwa program padat karya dana desa mampu menyerap minimal 55 tenaga kerja untuk setiap kegiatan dan rata-rata pemenuhan Hari Orang Kerja (HOK) masih di bawah 30 persen⁹. Selain itu pada penelitian Roni Ritonga (2019) juga mengungkapkan bahwa suatu proyek di desa dilakukan secara swakelola dan pekerja proyek diupah harian atau setiap minggunya. Dengan demikian, dana tidak hanya digunakan untuk membeli bahan

⁷ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman RH)

⁸ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman YS)

⁹ Irfan Sofi. Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Jurnal Matra Pembaruan, Vol 4 No.1. 2020: 25-35

material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja¹⁰. Hasil positif terlihat pada hasil penelitian Hidayat Eko Novanto dan Sri Wibawani pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa program padat karya desa mampu mengangkat pendapatan masyarakat terutama untuk masyarakat yang tidak punya pekerjaan maupun yang sedang membutuhkan pendapatan tambahan. Adapun kebermanfaatannya ini lebih dirasakan dari pada program pemberian bantuan langsung (BLT)¹¹.

3.2.2 Memupuk Rasa Kebersamaan, Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat

Adanya program ini khususnya bagi masyarakat Desa Tanjung Air Hitam diharapkan dapat memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa. Berikut tanggapan dari responden pada tabel 3.8

Tabel 3. 8

Memupuk Rasa Kebersamaan, Gotong Royong Dan Partisipasi Masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	5	10
2	Tidak	47	90
Jumlah		52	100

Sumber: Data Primer Mei 2023

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa dari 52 responden yang dijadikan sampel terdapat 47

responden atau 90% menyatakan **Tidak**, dan sisanya sebanyak 5 atau 10% menyatakan **YA**. Alasan mengapa mayoritas mengatakan tidak juga di buktikan melalui wawancara pada 2 orang responden:

Salah satu responden yaitu E mengungkapkan:

"Kebersamaan apanya? kalau kebersamaan itu harusnya semua dapat dan semua turut merasakan manfaatnya. Jika begini prosesnya maka wajar saja minim partisipasi dari masyarakat"¹²

Salah satu responden lainnya yaitu AS juga mengungkapkan:

"Tidak ada kebersamaan sama sekali"¹³

Berdasarkan ungkapan dari salah satu responden yaitu E dan AS, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden (90%) menyatakan program ini tidak memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat Desa Tanjung Air Hitam. Hal ini dapat dibuktikan melalui mimimnya partisipasi dan gotong royong dari masyarakat Desa Tanjung Air Hitam dalam percepatan penyelesaian dari program ini. Hanya para tukang saja serta ditinjau dari penanggungjawab pelaksanaan program yang terlihat ada di lokasi. Bagi masyarakat yang menerima bantuan ini hanya menyediakan air dan makanan ringan untuk para tukang yang bekerja secara individual. Hasil penelitian ini jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim 2009 yang

¹⁰ Roni Ritonga Manembu. Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Holistik*, Vol. 12 No. 2/ April–Juni 2019

¹¹ Novanto, HE dan Wibawani S. 2023. Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 14, No 2.

¹² (Wawancara tanggal 05 Mei 2023 berlokasi di kediaman E)

¹³ (Wawancara tanggal 05 Mei 2023 berlokasi di kediaman AS)

mana hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga diberikan pada seluruh tahapan program SANIMAS, sumbangan pikiran dan material diberikan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan serta partisipasi dalam bentuk uang diberikan dalam tahap pelaksanaan dan pemanfaatan. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong cukup tinggi¹⁴. Sedangkan pada penelitian Pawening pada tahun 2020, menunjukkan bahwa program padat karya tunai di Desa Wonoenggal justru menghilangkan nilai gotong royong dikarenakan masyarakat lebih realistis dan menempatkan prinsip pamrih sehingga apa yang dikerjakan harus mendapatkan imbalan yang setimpal. Perubahan ini menjadikan masyarakat menjadi ketergantungan terhadap program ini dikarenakan masyarakat jadi menggantungkan pendapatan program ini dan program padat karya tunai ini juga belum pada tahap pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan masih pada pembangunan fisik¹⁵. Sejalan dengan ini, penelitian Irfan Sofi juga menunjukkan kecenderungan berkurangnya semangat gotong royong. Apabila ada pekerjaan di desa selalu dilakukan melalui kerja bakti secara gotong royong. Semua warga secara sukarela ikut serta membantu mengerjakan perbaikan jalan

atau selokan. Saat ini setelah adanya PKT Dana Desa gotong royong mulai menurun, sedikit-sedikit warga menanyakan apakah ada upahnya. Seharusnya program PKT Dana Desa ini mampu menjadi stimulus untuk pengerjaan kegiatan yang ada di desa. Tidak semua kegiatan yang ada di desa harus dinilai dengan uang¹⁶. Dapat dikatakan melemahnya semangat gotong royong masyarakat karena segala sesuatu yang dikerjakan harus dibayar dengan menggunakan uang ketika tidak ada uang maka tidak akan dikerjakan yang artinya modal sosial gotong royong yang selama ini menjadi kebanggaan umumnya masyarakat desa semakin luntur.

3.2.3 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pemberdayaan Masyarakat

Adanya program ini diharapkan dapat Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Air Hitam. Berikut tanggapan dari responden pada tabel 3.9:

Tabel 3. 9
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas pemberdayaan masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	9	17
2	Tidak	43	83
Jumlah		52	100

Sumber: Data Primer Mei 2023

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa dari 52 responden yang dijadikan sampel terdapat 43 responden atau 83% menyatakan **Tidak**, dan sisanya sebanyak 9 atau

¹⁴ Surotinojo, Ibrahim (2009) Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (Sanimas) di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Masters Thesis, Universitas Diponegoro.

¹⁵ Pawening, A. S dan Lestari Puji. 2020. Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. Jurnal Pendidikan Sosiologi

¹⁶ Irfan Sofi. 2020 Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Jurnal Matra Pembaruan, Vol 4 No.1. hlm 25-35

17% menyatakan YA. Alasan mengapa mayoritas mengatakan tidak juga di buktikan melalui wawancara pada 2 orang responden:

Salah satu responden yaitu AN mengungkapkan:

"Bagi saya mungkin tidak sepenuhnya, jika taraf atau kualitas dari kesehatan masyarakat ini melalui sanitasi ini bisalah ditingkatkan, itupun hanya bagi penerima. Namun untuk kategori pemberdayaan saya kira tidak sama sekali."¹⁷

Responden yaitu SE juga mengungkapkan:

"Saya sebenarnya gak jadi soal, namun coba seharusnya program ini kan di kampung kita, mestinya kita juga diprioritaskan untuk diberi kerja"¹⁸

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden (83%) menyatakan program ini tidak meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Air Hitam. Mayoritas masyarakat Desa Tanjung Air Hitam menduga proses pembuatan toilet ini dipenuhi dengan unsur kepentingan lain dan sebagian besar dari masyarakat tidak dilibatkan. Anggaran dalam program sanitasi ini adalah senilai Rp. 500.000.000, sedangkan jumlah masyarakat miskin di Desa Tanjung Air Hitam sebanyak 79 orang. Meskipun sebagian dari penduduk miskin ini mendapat bantuan berupa toilet sanitasi ini, semestinya mereka juga bisa diikutsertakan dalam pembuatan toilet sanitasi ini sehingga komitmen dari Meningkatkan kualitas dan kuantitas

pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Air Hitam dapat terwujud, karena sebagian besar dari penduduk miskin ini berprofesi sebagai tukang. Hal ini bertentangan dengan penelitian Lutfi Hair Djunur, dkk (2022) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan program sanitasi dapat meningkatkan perluasan akses sanitasi dengan menyediakan prasarana dan sarana sanitasi yang berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan¹⁹.

Lalu pada penelitian Pawening pada tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa keterlibatan masyarakat pada implementasi program padat karya tunai merupakan bentuk realisasi pemberdayaan yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat terutama masyarakat menganggur. Berdasarkan jenis pemberdayaan menurut Beni (2016:148) maka program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi, dikarenakan program ini diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan atau memberdayakan masyarakat menganggur terutama untuk meningkatkan pendapatan²⁰.

3.2.4 Mewujudkan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin

Adanya program ini diharapkan dapat dapat Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada

¹⁷ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman AN)

¹⁸ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman SE)

¹⁹ Lutfi Hair Djunur, dkk. 2022. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sanitasi pada kawasan padat penduduk Di desa lengese kabupaten takalar. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 5. No.4.

²⁰ Pawening, A. S dan Lestari Puji. 2020. Implementasi Program Padat Karya Tunai Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. Jurnal Pendidikan Sosiologi

pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat. Berikut tanggapan dari responden pada tabel 3.10:

Tabel 3.10
Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	21	40
2	Tidak	31	60
Jumlah		52	100

Sumber: Data Primer Mei 2023

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa dari 52 responden yang dijadikan sampel terdapat 31 responden atau 60% menyatakan **Tidak**, dan sisanya sebanyak 21 atau 40% menyatakan **YA**. Alasan mengapa mayoritas mengatakan Tidak juga dibuktikan melalui wawancara pada 2 orang responden:

Salah satu responden yaitu AY mengungkapkan:

*"Barangkali iya bisa dikatakan demikian, akses kebersihan ini sangatlah penting, tidak terkecuali mau dari golongan masyarakat miskin maupun kaya, ini juga salah satu pendekatan yang positif juga masyarakat"*²¹

Salah satu responden lainnya yaitu SY juga mengungkapkan:

*"Barangkali iya bisa dikatakan demikian, akses kebersihan ini sangatlah penting, tidak terkecuali mau dari golongan masyarakat miskin maupun kaya, ini juga salah satu pendekatan yang positif juga masyarakat"*²²

²¹ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman YA)

²² (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman SY)

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden (60%) menyatakan program ini tidak. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Karmila dkk 2009, program padat karya dalam penelitiannya dikatakan bahwa minimnya partisipasi masyarakat, sebagian besar lebih memilih berkebutuhan dari pada berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan padat karya²³. Berbeda dengan penelitian Ujang Endi dan Ni Wayan pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah desa pada dua lokasi penelitian dalam melaksanakan PKT Dana Desa sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Anggaran Dana Desa yang dikelola oleh Desa dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat marginal. Walaupun telah mencukupi dalam hal memberdayakan masyarakat marginal dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, Sifat PKT di Desa sebagai solusi jangka pendek dan hanya bermanfaat sebagai tambahan penghasilan bagi kelompok sasaran. Oleh sebab itu, PKT belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang tetap bagi masyarakat. Sehingga belum signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran²⁴.

²³ Karmila 2009, Pemberdayaan masyarakat desa berbasis program padat karya tunai di desa tongkonan basse kecamatan masalle kabupaten enrekang

²⁴ Kurnia, U. E dan Widhiasthini, N. W. 2021. Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan

3.2.5 Menekan Jumlah Pengangguran dan Masyarakat Miskin

Adanya program ini diharapkan dapat menekan jumlah pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin. Indikator ini dapat berjalan dengan cara menyerap tenaga kerja masyarakat di desa masing-masing melalui pembangunan infrastruktur desa yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri sebagai pekerjanya. Untuk di Desa Tanjung Air Hitam dilakukan program pembangunan sanitasi perdesaan padat karya di desa.

Berikut tanggapan dari responden pada tabel 3.11:

Tabel 3. 11
Menekan Jumlah Pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	13	27
2	Tidak	38	73
Jumlah		52	100

Sumber: Data Primer Mei 2023

Berdasarkan Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa dari 52 responden yang dijadikan sampel terdapat 38 responden atau 73% menyatakan **Tidak**, dan sisanya sebanyak 13 atau 27% menyatakan **YA**. Alasan mengapa mayoritas mengatakan tidak juga di buktikan melalui wawancara pada 2 orang responden:

Salah satu responden yaitu AY mengungkapkan:

"Bagi saya pribadi tidak sama sekali, coba saja tanyakan juga pada

*masyarakat sini pasti sama pendapatnya"*²⁵

Salah satu responden lainnya yaitu SS juga mengungkapkan:

*"nyatanya tetep aja masyarakat masih banyak yang menganggur"*²⁶

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden (73%) menyatakan program ini tidak Menekan Jumlah Pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan jumlah masyarakat miskin yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang harian lepas, dengan adanya pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat karya di Desa Tanjung Air Hitam ini selain dapat meningkatkan taraf kebersihan masyarakat semestinya juga dapat menekankan angka kemiskinan masyarakat Desa Tanjung Air hitam. Berbeda dengan hasil penelitian Roni 2019, melalui program padat karya di mana suatu proyek di desa dilakukan secara swakelola sangat berkontribusi dalam menekan angka pengangguran masyarakat²⁷. sejalan dengan itu pada hasil penelitian Hidayat Eko pada tahun 2023 di Desa Wedi, Sidoarjo, implementasi program padat karya tunai desa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang mampu mengangkat pendapatan masyarakat terutama untuk masyarakat yang tidak punya pekerjaan maupun yang sedang membutuhkan pendapatan tambahan. Adapun kebermanfaatannya ini lebih dirasakan daripada program pemberian

²⁵ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman AY)

²⁶ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman SS)

²⁷ Roni 2019, Padat karya sebagai kontribusi kehidupan masyarakat pada penggunaan dana desa

bantuan langsung (BLT). Hal ini karena kebermanfaatan Program PKTD dapat dirasakan tidak hanya bagi masyarakat desa saja melainkan pemerintah desa juga merasakan manfaat tersebut dalam menjalankan program desa bisa cepat terselesaikan. Sasaran kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan program PKTD di Desa Wedi berasal dari masyarakat Desa Wedi itu sendiri yang diambil dari masing-masing wilayah sesuai dengan jadwal kegiatan PKTD di wilayah Desa Wedi. Dalam hal ini, masyarakat difokuskan pada masyarakat pengangguran yang memiliki kemampuan sebagai tenaga ahli. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang memahami bidang pekerjaan²⁸. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Tanjung Air Hitam yang mana tidak semua pekerja berasal dari dalam desa, karena ada beberapa pekerja yang diambil dari luar desa yang tentunya mengecewakan masyarakat.

3.2.6 Membangkitkan Kegiatan Sosial dan Ekonomi di Desa

Adanya program ini diharapkan dapat membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa. Berikut tanggapan dari responden pada tabel 3.12:

Tabel 3.12
Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	19	37
2	Tidak	33	63
Jumlah		52	100

²⁸ Novanto, HE dan Wibawani S. 2023. Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2.

Sumber: Data Primer Mei 2023

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa dari 52 responden yang dijadikan sampel terdapat 33 responden atau 63% menyatakan **Tidak**, dan sisanya sebanyak 19 atau 37% menyatakan **YA**. Alasan mengapa mayoritas mengatakan tidak juga di buktikan melalui wawancara pada 2 orang responden:

Salah satu responden yaitu S mengungkapkan:

"Mungkin tidak juga, kan sudah ada tukang yang mengerjakan toilet ini, kami cuman terima beres. Apalagi toilet ini sifatnya individu atau setiap rumah"²⁹.

Salah satu responden lainnya yaitu RA juga mengungkapkan:

"ada juga beberapa masyarakat yang bantu, pun karena toilet itu dirumahnya atau rumah neneknya, jadi ikut bantuin sikit-sikit"³⁰.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden (63%) menyatakan program ini tidak membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa. Hal ini merupakan pernyataan masyarakat karena merasa tenaga mereka tidak terlalu diperlukan pada program ini karena mereka merasa sudah ada pihak yang digaji untuk menuntaskan program ini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Karmila dkk 2009, program padat karya dalam penelitiannya dikatakan bahwa minimnya partisipasi masyarakat, sebagian besar lebih memilih berkebut

²⁹ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman S)

³⁰ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman RA)

dari pada berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan padat karya³¹. Sedangkan pada penelitian Hidayat Eko Novanto dan Sri Wibawani pada tahun 2023, melihat sikap aparatur/pemerintah selama pelaksanaan PKTD di Desa Wedi berlangsung, pada praktiknya masih ditemukan kekurangan dalam menjangkau seluruh sasaran kegiatan PKTD, karena sosialisasi hanya kepada perwakilan masyarakat saja³². Sedangkan pada penelitian Budiasa dkk pada tahun 2019 menunjukkan dampak ekonomi dari program padat karya desa meliputi:

- 1) menciptakan kesempatan kerja sementara melalui pembangunan secara swakelola dan PKT untuk penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, dan penduduk dengan masalah stunting di desa
- 2) menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan upah/pendapatan masyarakat desa tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama
- 3) membangkitkan kegiatan ekonomi di desa
- 4) meningkatkan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan dan daya beli masyarakat desa

³¹ Karmila 2009, Pemberdayaan masyarakat desa berbasis program padat karya tunai di desa tongkonan basse kecamatan masalle kabupaten enrekang

³² Novanto, HE dan Wibawani S. 2023. Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2.

- 5) mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal³³.

3.2.7 Meningkatkan Akses Sanitasi

Adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat Desa Tanjung Air Hitam. Berikut tanggapan dari responden pada tabel 3.13:

Tabel 3. 13

Meningkatkan akses Sanitasi bagi masyarakat Desa Tanjung Air Hitam.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	45	87
2	Tidak	7	13
Jumlah		52	100

Sumber: Data Primer mei 2023

Berdasarkan Tabel 3.13 dapat diketahui bahwa dari 52 responden yang dijadikan sampel terdapat 7 responden atau 13% menyatakan **Tidak**, dan sisanya sebanyak 45 atau 87% menyatakan **YA**. Alasan mengapa mayoritas mengatakan ya juga di buktikan melalui wawancara pada 2 orang responden:

Salah satu responden yaitu RD mengungkapkan:

*"Kalau itu jelas ia saya kira, kami juga mengakui itu, selama inikan kebersihan dari toilet-toilet warga ini memang tampak buruk dan perlu pembenahan"*³⁴

Salah satu responden yaitu RH mengungkapkan:

"Iya, semulanya memang tampak kalau toilet mandi atau"

³³ Budiasa, A.A.G.R. 2019. Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. Jurnal Administrasi Publik, Vol 4 No 2.

³⁴ (Wawancara tanggal 05,Mei,2023 berlokasi di kediaman RD)

MCK masyarakat ini tampak kumuh dan rawan penyakit. Sekarang sudah rapi dan tinggal dikelola dengan baik saja oleh yang punya”³⁵

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden (87%) menyatakan program ini dapat Meningkatkan akses Sanitasi bagi masyarakat Desa Tanjung Air Hitam. Terlepas dari lapangan pekerjaan dari program ini yang tidak terbuka bagi masyarakat Desa Tanjung Air Hitam, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat karya di Desa Tanjung Air hitam ini dapat meningkatkan taraf kebersihan masyarakat, diharapkan dengan adanya toilet yang layak dan bersih dapat membuat masyarakat menjadi sehat dan terhindar dari kuman dan penyakit. Hal ini juga selaras dengan penelitian Ibrahim yang bertujuan untuk mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program SANIMAS di Desa Bajo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Penelitian ini juga memperoleh hasil yang positif terkait peningkatan akses sanitasi bagi masyarakat³⁶. pada penelitian Rumsari dan Lukas tahun 2019 menunjukkan bahwa dari pemanfaatan dana desa melalui proyek padat karya di Desa Kersanegara melalui program percepatan peningkatan tata guna air

irigasi membantu masyarakat tidak hanya dari sisi perolehan pendapatan, tetapi proyek tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat terutama yang hidup di sekitar pertanian³⁷.

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya adalah Program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dalam melalui penyediaan sarana sanitasi. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 04/SE/DC/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya, Maksud dari Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya ini adalah Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara Swakelola dan padat karya Dan Tujuannya adalah Menciptakan lapangan kerja sementara yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi warga setempat. Akan tetapi pada realitanya pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat karya di Desa Tanjung Air hitam tersebut dilaksanakan atau dikerjakan oleh masyarakat yang berasal dari luar daerah. Sebanyak 20 orang pekerja dari luar desa yang bekerja sebagai tukang untuk program sanitasi perdesaan padat karya di Desa Tanjung Air Hitam. Sementara di Desa Tanjung Air Hitam itu sendiri juga memiliki sekitar 18 orang tukang yang bisa bekerja untuk program tersebut tetapi semuanya tidak dipekerjakan justru mereka yang dari luar yang bekerja. Fenomena ini, menimbulkan kekecewaan dari masyarakat asli Desa

³⁵ (Wawancara tanggal 05, Mei, 2023 berlokasi di kediaman RH)

³⁶ Ibrahim Surotinodjodengan judul: “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (SANIMAS) Di Desa Bajo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo

³⁷ Sumarto, R.H. 2019. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal Publihuo*, Vol 2, No 2

Tanjung Air Hitam karena pelaksanaan program yang seharusnya berdasarkan peraturan itu dilakukan secara swakelola, tetapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Swakelola disini adalah program sanitasi perdesaan padat karya dilaksanakan secara mandiri oleh desa dengan mendayagunakan tenaga kerja dan peralatan serta teknologi yang ada di desa.

Fenomena yang ditemukan pada penelitian di Desa Tanjung Air Hitam adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program sanitasi di Desa Tanjung Air Hitam dilakukan oleh tukang dari luar desa, sehingga menimbulkan kontra dalam masyarakat desa. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan angket sebagai alat pengukur dari respon atau tanggapan dari responden/masyarakat
2. Tidak semua masyarakat miskin yang mendapat program sanitasi Desa Tanjung Air Hitam. Hal ini dibuktikan berdasarkan jumlah sanitasi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang berjumlah 79 orang namun yang dapat menerima hanya 52 orang sedangkan sisanya sebanyak 27 orang atau masyarakat miskin lainnya yang menerima dijanjikan sejumlah pekerjaan dari program ini pada kenyataannya tidak dilibatkan sebagai pekerja tukang. Hal ini lah menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Desa Tanjung Air Hitam

Menurut Sedarmayanti (2014:22) Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit

penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Efisiensi suatu program dapat dilihat dalam proses pembentukan dan atau pelaksanaan program, melihat bagaimana pengelola program bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cepat, tepat serta memuaskan.

Dalam hal ini, berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson (1996:34), dalam poin efisiensi dinilai cukup efektif dan maksimal karena berdasar atas dana yang telah disediakan yang kemudian pengelola menyusun RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) dan proses pembangunan program berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Setelah itu, dengan dikurkannya program sanitasi ini semestinya memberikan kepuasan tersendiri bagi penerima program.

Menurut Kotler dan Keller (2018:138), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Apabila kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Selain itu, apabila kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang.

Kepuasan masyarakat merupakan tujuan dari pemerintah dalam membentuk suatu program. Apabila masyarakat merasa puas dan terbantu dengan adanya program ini maka

program dapat dikatakan berhasil. Sementara itu, hasil penelitian telah membuktikan respon negatif terkait program sanitasi ini khususnya pada konteks pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson (1996:34), pada poin kepuasan dapat dikatakan tidak berhasil karena masyarakat merasa tidak puas pada aspek pembukaan lapangan kerja dan terbantu dengan adanya program.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program sanitasi di Desa Tanjung Air Hitam dilakukan oleh tukang dari luar desa, sehingga menimbulkan kontra dalam masyarakat desa. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan angket sebagai alat pengukur dari respon atau tanggapan dari responden/masyarakat
2. Tidak semua masyarakat miskin yang mendapat program sanitasi Desa Tanjung Air Hitam. Hal ini dibuktikan berdasarkan jumlah sanitasi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang berjumlah 79 orang namun yang dapat menerima hanya 52 orang sedangkan sisanya sebanyak 27 orang atau masyarakat miskin lainnya yang menerima dijanjikan sejumlah pekerjaan dari program ini pada kenyataannya tidak dilibatkan sebagai pekerja tukang. Hal ini lah menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Desa Tanjung Air Hitam

3.2 Saran

Demi kelancaran dan keberhasilan suatu program, maka pemerintah Desa Tanjung Air Hitam perlu melakukan pendekatan yang lebih detail terhadap program apapun yang berbasis masyarakat serta melibatkan masyarakat secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin, S. Z. (2016). Kebijakan Publik (3rd ed). Jakarta: Salemba Humanika
- Andi Prastowo, Metode Penelitian kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media,2016),
- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta
- Asra, A. (2014). Esensi Statistik Bagi kebijakan Publik. Jakarta: IN MEDIA.
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Pranada Media Grub,2006),
- Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta, : Calpuls,2015),
- Indiahono, D. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: GAVA MEDIA
- Karding. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang. Pasca Sarjana UnDip, 1-151.
- Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: GAVA MEDIA.

- Matthew B. Miles Dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku*
- Nugroho, R. (2017). *Public policy* (6th ed). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, H. (2014). *Teori PELAKSANAAN Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.]
- Purwanto, E. A, & Sulistyastuti, D. R. (2015). *PELAKSANAAN Kebijakan public Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Rudy & E. Ariyanto, eds.). Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sujianto. (2008). *PELAKSANAAN Kebijakan Publik Konsep,Teori,dan praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*,(Jakarta:Kencana,2010) hlm.199
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Umar. (2005), Umar, Husein. 2005. *Evaluasi Kinerja perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, kuantitatif,dan Modern)*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model PELAKSANAAN Kebijakan Publik* (F. Hutari, ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno,B.(2016).*Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta:CAPS
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik:Teori Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT.Buku Seru